

Moral-Religius Sebagai *World View* Dalam Sistem Ekonomi Islam

H.M. Yazid Afandi¹

ABSTRAK

Sudah banyak kritik yang dilakukan oleh para ekonom terhadap kelemahan sistem ekonomi kapitalisme. Kritik tersebut bermuara kepada dua hal yang sangat mendasar. Pertama, fakta tentang munculnya berbagai macam anomali dari sistem ekonomi yang berkembang di masyarakat, yang banyak diinspirasi oleh teori ekonomi kapitalisme gagasan Adam Smith. Kedua adalah sulitnya sistem ekonomi tersebut hilang dari masyarakat. Faktanya, sudah terlalu sering ada upaya untuk menggusur sistem tersebut, akan tetapi pada saat yang bersamaan, praktek ekonomi –yang didemonstrasikan oleh para pengambil kebijakan-, tetap mewakili ide-ide smithian.

Atas fakta di atas, menjadi penting untuk mencari rumusan sistem ekonomi yang menawarkan landasan mendasar bagi kebutuhan manusia yaitu terpenuhinya kebahagiaan hakiki, kebahagiaan pada ranak esoterik dan eksoterik. Salah satu kegagalan para penentang kapitalisme dalam mendiseminasikan sistem ekonomi alternatif yang mereka tawarkan, diantaranya dikarenakan ketidak mampuannya menawarkan sistem ekonomi alternatif yang dapat menyentuh aspek yang sangat fundamental dari kebutuhan dasar manusia.

Tulisan ini hendak mengungkap tawaran solutif yang saya yakini akan dapat menyelesaikan problem kemamusiaan akibat anomali sistem ekonomi yang banyak dikaji dan dipraktekkan oleh masyarakat. Ekplorasi dilakukan dengan mencoba mendialogkan ide-ide para ahli, dalam rangka untuk menemukan *critical point*, kemudian memberikan alternatifnya. Informasi yang

kami gunakan sepenuhnya berasal dari kajian literatur. Saya berusaha untuk menghadirkan buku induk dari seorang *author*, akan tetapi, jika buku tersebut tidak dapat saya temukan, - karena berbagai macam keterbatasan-, dengan sangat terpaksa saya menghadirkan kutipannya dari penulis lain.

Hasil diskusi dalam tulisan ini adalah sebuah tawaran alternatif dari sistem Ekonomi Islam yang secara filosofis-ideologis berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada lima hal; pertama, Ekonomi Islam base on religiosity value dan ilahi oriented yang berdampak pada munculnya *self control*. Kedua, konsep kepemilikan individu yang tidak mutlak. Ketiga, menekankan aspek keseimbangan kepentingan individu dan kolektif. Keempat, adanya kecaman terhadap monopoli dan sentralisasi harta oleh pemodal. Keempat hal tersebut jika dilaksanakan dengan konsisten akan berdampak pada pembentukan karakter kuat dan bermoral bagi para pelaku ekonomi

A. Pendahuluan

Dalam Artikel yang dimuat di Jawa Pos sekitar tiga tahun yang lalu, Sri-Edi Swasono menegaskan tentang "tonggak kematian" kapitalisme. Ia berujar:

Memurut catatan akademis saya, sudah lima kali ditegaskan perlu diakhirinya pasar bebas (*the end of laissez-faire*). Kali pertama oleh John Maynard Keynes sendiri (1926); kedua oleh Polanyi (1944); ketiga oleh Myrdal, Galbraith dst (1957-1960); dan keempat oleh Kuttner, Thurow, Sen, Soros, Stiglitz dst (1990-2002). Intinya adalah pasar penuh kegagalan-kegagalan, terutama dalam mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural. Hurwicz, Maskin, dan Myerson - ketiganya penerima hadiah Nobel Ekonomi 2007- menjadi penegas kelima. Hatta juga

¹ Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi UII dan Penerima Beasiswa Unggulan Badan Kerjasama Luar Negeri Depdikbud RI

sudah menegaskan hal ini (*Krisis Ekonomi dan Kapitalisme, Batavia, 1934*).²

Dapat dilihat dari kutipan di atas, bahwa Sri-Edi Swasono sedang melakukan kritik terhadap konsep pasar bebasnya kapitalisme Adam Smith. Para ekonom yang dikutip di atas, menginginkan konsep pasar bebas segera diakhiri dan tidak menjadi ideologi dunia lagi. Mereka tampaknya sepakat, bahwa jika konsep tersebut diterapkan secara membabi buta, dunia tidak akan pernah menemukan kesejahteraan yang hakiki.

Meskipun secara eksplisit dalam tulisan tersebut Sri-Edi melakukan kritik pada konsep pasar bebasnya Adam Smith, namun secara lebih luas saya memahami, bahwa kritik tersebut bukan semata-mata diarahkan pada konsep pasar bebas *an sich*, akan tetapi juga diarahkan pada konsep kapitalisme secara umum. Asumsi saya beralasan karena konsep pasar bebas adalah sistem bawaan dari sistem induknya, kapitalisme. Di samping itu, dalam beberapa kesempatan Sri-Edi sendiri tidak saja melakukan kritik terhadap konsep pasar bebas, tetapi juga kapitalisme secara lebih luas.

Kapitalisme dengan berbagai macam konsep bawaannya tersebut sebenarnya mengandung berbagai macam anomali yang menjadi titik kritik para penentangannya. Akan tetapi uniknya, -sebagaimana diakui oleh Sri-Edi Swasono dalam lanjutan artikel tersebut-, ia seolah tidak pernah mati, meski sudah

²Sri-Edi Swasono, *The End of Laissez-Faire*, Jawa Pos, 9 Oktober 2008, kolom opini.

berupaya "dibunuh" berkali-kali. Kapitalisme tetap bercokol dan tetap menjadi paradigma pengambil kebijakan.

Maka dapat diambil kesimpulan sebenarnya ada dua problem mendasar dalam ilmu ekonomi yang dipelajari para mahasiswa di bangku-bangku sekolah. *Pertama*, fakta tentang munculnya berbagai macam anomali dari sistem ekonomi yang berkembang di masyarakat. Tanpa hendak menyederhanakan masalah, anomali tersebut muncul karena banyak diinspirasi oleh teori ekonomi kapitalisme yang digagas Adam Smith. Berbagai macam kritik dari para ekonom terhadap teori-teori turunan kapitalisme tersebut membuktikan bahwa setiap orang yang belajar sistem ekonomi harus menyadari akan sisi negatif dari kapitalisme. Problem *kedua* adalah sulitnya sistem ekonomi tersebut hilang dari masyarakat. Ujaran Sri-Edi Swasono di atas menggambarkan telah ada upaya yang berulang kali untuk menggusur sistem tersebut. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, praktek ekonomi -yang didemonstrasikan oleh para pengambil kebijakan-, tetap mewakili ide-ide smithian³. Sehingga sulit untuk menyimpulkan ideologi kapitalisme tidak lagi dipraktekkan. Dalam prakteknya ia masih banyak menginspirasi pengendali kebijakan ekonomi masyarakat.

³ "Smithian" adalah istilah untuk menyebut para pengikut teori Adam Smith. Istilah ini saya kutip dari ungkapan Sri-Edi Swasono dalam beberapa tulisannya. Untuk selanjutnya istilah smithian akan sering saya gunakan dalam tulisan ini.

Atas dua problem tersebut, hal yang harus dilakukan adalah segera merekonstruksi sebuah sistem ekonomi yang dapat menjamin kesejahteraan hakiki. Kesejahteraan yang dapat menjamin keseimbangan kebahagiaan diantara para anggota masyarakat yang memang diciptakan Tuhan dengan kondisi yang berbeda-beda. kesejahteraan hakiki adalah sebuah kesejahteraan yang membahagiakan seorang individu pada dua ranah sekaligus, ranah esoteris dan eksoteris, ranah jasmani dan ranah rohani, ranah batin dan ranah lahir, ranah dunia dan ranah akhirat. Untuk itu, adalah sebuah keniscayaan jika konstruksi sistem ekonomi yang hendak ditawarkan kepada masyarakat harus mampu menyentuh pada aspek yang sangat mendasar dari kebutuhan manusia, yaitu aspek rohani.⁴ Dapat dipahami, salah satu kegagalan para penentang kapitalisme dalam mendiseminasikan sistem ekonomi alternatif yang mereka tawarkan, diantaranya dikarenakan oleh karena ketidak mampuan menawarkan sistem ekonomi alternatif yang dapat menyentuh aspek yang sangat fundamental dari kebutuhan manusia, meskipun saya sendiri belum melakukan penelitian hal tersebut secara detail. Untuk itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengimbangi kegagalan kapitalisme

⁴ Aspek ruhani inilah yang banyak dilupakan oleh para ekonom dan pelaku ekonomi. Padahal, andaikan manusia mampu menyadari akan posisi dirinya, dia akan mudah menyimpulkan bahwa kebutuhan mendasar bagi keberadaannya adalah aspek rohani. Bahagia, susah, senang, gembira dan lain-lain adalah aktifitas rohani.

bukan sekedar tawaran alternatif hasil dari kritik kapitalisme, akan tetapi sebuah sistem ekonomi yang *based on fundamental need* bagi kehidupan manusia di atas.

Tulisan singkat ini hendak mengungkap sebuah sistem ekonomi alternatif, -yang kemudian dikenal dengan sistem ekonomi Islam-, dari sistem-sistem ekonomi yang telah ada. Secara *epistemologis*, sistem ekonomi ini berbeda dengan sistem ekonomi lainnya, sebab ia dibangun atas dasar pengenalan pesan-pesan universal Sang Pencipta yang disampaikan kepada Nabi-Nya, Muhammad SAW. Perancang bangun sistem ekonomi Islam telah "melibatkan Tuhan" ketika menjalani proses perumusannya baik dalam hal materiil maupun secara formil proseduralnya.

Meskipun sistem ekonomi Islam sudah dibahas berulang-ulang, namun kehadiran tulisan ini, -yang juga masih membahas sistem ekonomi Islam-, menurut hemat saya, tetap memiliki nilai signifikansinya. Sebab tulisan ini lebih diarahkan untuk mendemonstrasikan sebuah bukti bahwa sistem Ekonomi Islam seharusnya layak untuk diterapkan sebagai sebuah jawaban atas kegagalan sistem ekonom kapitalis di tengah-tengah ketidak mampuan pengkritik kapitalisme dalam menawarkan sistem ekonomi alternatif. Tulisan ini secara sistematis -lewat beberapa bagiannya- hendak mendiskusikan tentang

diskusi tentang "value" yang terkandung dalam sistem ekonomi.

Untuk tujuan tersebut ada beberapa bagian yang hendak didiskusikan. Pertama seputar tarik menarik di kalangan ekonom apakah ilmu ekonomi *base on value* atau tidak. Pembahasan ini sebagai pintu masuk akan pentingnya membongkar kapitalisme, yang ternyata problem utamanya adalah pandangan penafian terhadap *value* ini. Setelah membahas hal tersebut, pembahasan diarahkan kepada pandangan-pandangan pesimis terhadap keberadaan ilmu ekonomi tatkala ia lepas dari *value*, sebagai sebuah bukti bilamana ilmu ekonomi tanpa dilandasi *value*. Namun demikian pertanyaan selanjutnya, *value* yang seperti apa yang mesti dijadikan sebagai landasan ilmu ekonomi? Maka, di sinilah ekonomi Islam menawarkan sebuah *value* yang apabila diyakini dan diterapkan akan memiliki dampak positif bagi kehidupan bermasa.

B. Ilmu Ekonomi Bebas Nilai?

Adalah sebuah fakta, jika ekonomi konvensional (atau lebih tepatnya kapitalisme Adam Smith) memisahkan secara diametral antara persoalan ekonomi dengan persoalan moralitas. Lantaran pemisahan secara diametral inilah muncul berbagai macam kritik dan bahkan efek negatif dari penerapan sistem tersebut. Kesimpulan seperti ini akan mudah ditemukan, ketika kita mencermati

beberapa teori dasar ekonomi konvensional seperti *Utility maximization of self interest*. Lantaran teori inilah, misalnya, Amitai Etzioni, seorang sosiolog terkemuka, melakukan kritik luar biasa dengan menyebutkan absurditas ilmu ekonomi. Ia berkomentar:

*"Apakah manusia itu sekeluarga dengan kalkulator yang "dingin" dan tidak peduli, yang masing-masing berusaha "memaksimalkan" kesejahteraannya sendiri. Andaikan manusia memandang diri sendiri, baik sebagai anggota komunitas maupun sebagai individu yang mencari dirinya, bagaimana garis-garis ditarik diantara komitmen kepada orang banyak dan kepada dirinya".*⁵

Lebih jauh Etzioni juga menegaskan kritiknya terhadap individualisme ekonomi yang melatarbelakangi ilmu ekonomi yang banyak dianut oleh masyarakat modern. Ia menyatakan *privacy is societal license*, yang maksudnya kurang lebih urusan pribadi orang perorang terkait dengan hak orang banyak yang harus diperhatikan. Untuk itulah, bagi Etzioni, menurut Sri Edi Swasono ilmu ekonomi lebih menonjolkan kepentingan sosial.⁶ Kepentingan pribadi yang berlebihan mestinya tidak ada tempat.

Adam Smith yang didudukkan oleh para ekonom sebagai bapak ekonomi kapitalisme sebenarnya pada awal dia menulis

⁵ Dikutip dari: Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial, Dari Klasikal dan Neo Klasikal Sampai ke The End Of Laissez-Faire*, (Jakarta: Perkumpulan Pra Karsa, 2010), hlm 31

⁶ *Ibid*, hlm. 32

buku tentang ekonomi, sudah menjadikann nilai-nilai moral sebagai basis ilmu ekonomi.⁷ Hal itu tertuang dalam buku pertamanya *The Theory Of Moral sentiments* yang ditulis pada tahun 1759. Dalam buku tersebut Smith berujar:

*How selfish soever man may be supposed, there are evidently some principles in his nature, wick interest him in the fortune others, and render their happiness necessary to him, though he derives nothing from it, except the pleasure of seeing it...*⁸

Perkataan “seberapapun egoisnya seseorang, pada dasarnya manusia merasa senang atas keberuntungan orang lain” merupakan pengakuan smith akan etika sosial yang ada dalam diri seorang individu. Smith sendiri mengakui hal tersebut merupakan kebutuhan mendasar manusia. Sehingga sebenarnya dari sini, dapat terlihat bahwa keberadaan nilai-nilai moral merupakan sisi yang paling esensial dalam ilmu ekonomi, bahkan menurut sang pendiri kapitalisme sekalipun.

Akan tetapi tujuh belas tahun kemudian, tepatnya tahun 1776, dia menulis buku yang cukup fenomenal, *The wealth of Nations* yang secara garis besar dalam buku tersebut ia mengkampanyekan tentang paham individualisme dan *perfect individual liberty*.

⁷ Lihat: Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, 2010) hlm 6.

⁸ Ujaran smith di atas saya kutip dari Sri-Edi Swasosno, *Ibid*, hlm 8. Lebih lengkapnya lihat: Adam Smith, *Theory of Moral sentiments* (Boston: Well and Lilly, 1817) hlm 1

Teori inilah yang memberikan ruang yang sangat luas terhadap kepentingan pribadi. Dari teori ini muncul pandangan bahwa kesejahteraan bersama adalah kumpulan kesejahteraan-kesejahteraan individu. Sehingga para individu dipandang memiliki kemutlakan untuk menentukan kepentingan pribadinya.

Hal yang kemudian dipertanyakan oleh Etzioni adalah ketidak konsistenan Adam Smith dalam memandang moral sebagai basis ilmu ekonomi. Sehingga muncul buku Etzioni *The Moral Dimensions: Toward a New Economics*. Dalam buku tersebut Etzioni melihat ada pergeseran pemikiran dari seorang Adam Smith yang tidak mudah untuk dirukunkan. Moralitas yang pada awalnya dikatakan Smith sebagai basis ilmu ekonomi, pada akhirnya harus bertabrakan dengan ide individualismenya. Atas paradoksal pemikiran seperti ini Etzioni menyebutnya dengan istilah *das Smith Problem (The Problem of Smith)*.

Di Indonesia tidak sedikit ekonom yang mempertanyakan tentang, -meminjam istilah Etzioni-, absurdnya ilmu ekonomi yang menafikan persoalan moral. Mohammad Hata misalnya; ia menegaskan perihal *self interest* (individualisme) sebagai berikut:

Teori Adam Smith berdasar kepada perumpamaan homo economicus, yakni orang yang mengetahui keperluannya yang setinggi-tingginya, yang mengetahui kedudukan pasar, yang pandai

berhitung secara ekonomi dan rasional, dan dapat menimbang sendiri apa yang beruntung bagi dia dan apa yang merugikan dan kemudian ia sama kuat dan sama paham dengan lawannya (sebagai manusia rasional). Akan tetapi orang ekonomi seperti lukisan ini hanya ada dalam dunia pikiran, sebagai dasar bekerja bagi penyelidik ilmu, dan tidak ada dalam masyarakat yang lahir yang menyatakan suatu golongan kecil yang aktif dan bermodal cukup, yang memutuskan segala soal ekonomi; dan satu golongan besar, orang banyak yang pasif dan lambat, yang tiada mempunyai tenaga ekonomi; yang penghidupannya terserah kepada keputusan golongan pertama... sebab itu dalam praktek *laissez-faire* stelsel tidak bersua maksimum kemakmuran yang diutamakan oleh Adam Smith.. ia memperbesar mana yang kuat, menghancurkan mana yang lemah.⁹

KRT Rajiman Widyodiningrat juga memiliki pandangan yang senada dengan Hata. Pada tahun 1942-an, ia menuding bahwa Adam Smith termasuk golongan cerdik pandai yang tidak memasukkan pamrih pribadi (*self interest*) sebagai penyakit masyarakat.¹⁰ Secara eksplisit Rajiman menyebut moralitas dalam berekonomi adalah bagian penting, sehingga ia menyebut *self interest* merupakan bagian dari penyakit masyarakat.

⁹ Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika, Mewaspada Globalisasi dan Pasar Bebas*, hlm 13

¹⁰, *Ibid*, hlm 15

Pergulatan pemikiran antara ilmu ekonomi dan moralitas inilah yang menjadi problem mendasar di kalangan para ekonom dalam memandang ilmu ekonomi. Apakah ilmu ekonomi bebas nilai moral atau tidak? Dari sini kerumitan kelihatan muncul. Jika memang bebas nilai, bagaimana atau dengan cara apa (kemungkinan) terjadinya benturan kepentingan akan ditengahi? Sama rumitnya untuk menegaskan, jika memang tidak bebas nilai, apa standar nilai yang mesti digunakan? mengingat sudah dapat dipastikan bahwa setiap pemikir akan menggunakan standar nilai yang berbeda.

C. Pandangan Pesimis Terhadap Masa Depan Ekonomi

Entah apakah ada kaitan atau tidak dengan pandangan smithian, -tentang *perfect individual liberty* yang ditengarai memisahkan nilai moral dari ilmu ekonomi-, faktanya banyak para ilmuwan melakukan kritik terhadap praktek ekonomi dewasa ini. Berbagai macam anomali di masyarakat disebabkan oleh gagalnya *world view* para ekonom yang sebagian besar tidak menghiraukan pada persoalan moralitas. Resesi dunia yang telah terjadi berkali-kali ditengarai akibat arah ekonomi dunia yang tidak *care* pada persoalan moralitas. Saya memang belum pernah melakukan penelitian hal tersebut secara detail. Akan tetapi, tidak sulit mendapatkan komentar pesimis terhadap masa depan ekonomi dunia kini. Sebagian

kecil komentar pesimis tersebut saya kutip di bawah ini.

Adalah Helmut Schmidt, mantan kanselir Republik Federasi Jerman, pernah menampakkan kekusarannya terhadap perkembangan ekonomi dunia yang ia nyatakan semakin tidak menentu. Ia berujar, "*Ekonomi dunia tengah memasuki suatu fase yang sangat tidak stabil dan masa mendatang sama sekali tidak menentu*".¹¹ Sebuah pandangan pesimis terhadap kondisi perkembangan ekonomi dunia.¹²

¹¹ Helmut Schmidt, "The Structure Of The World Product", *Foreign Affairs*, April 1974 hlm 437, sebagaimana dikutip oleh M Umar Chapra dalam: *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, Lukman Hakim (Penterj.), (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima yasa, 1997), hlm xxiii

¹² Pandangan tersebut sangat mungkin muncul akibat kondisi faktual negara-negara kapitalis-imperialis yang melakukan pengerukan keuntungan tanpa didasari moralitas pada awal-awal abad XX. Setelah perang dingin I berakhir, banyak negara-negara kapitalis-imperialis yang mengalami kebangkrutan akibat biaya perang yang cukup tinggi. Dampak yang paling monumental dari peristiwa ini adalah terjadinya resesi ekonomi dunia pada awal tahun 1930-an. Untuk memulihkan kembali kondisi perekonomian, negara-negara kapitalis-imperialis mulai melakukan konsolidasi dengan melakukan restrukturisasi bidang moneter maupun sektor riil. Sementara itu, banyak negara-negara jajahan yang menuntut kemerdekaan baik secara fisik maupun secara diplomatis. Untuk menghadapi tuntutan negara-negara jajahan ini, negara kapitalis-imperialis ketika itu mencoba berakrobat, dengan tetap mencengkeram negara (bekas) jajahan tanpa kehilangan dominasinya, semata-mata didasari pertimbangan mengeruk keuntungan material semata. Kemudian mereka membentuk World Bank dan IBRD yang beroperasi pada tahun 1946. dan juga membentuk IMF yang beroperasi tahun 1947. semua ini mereka bentuk dengan tujuan akhir tetap mencengkeram negara-negara lemah untuk kepentingan negara-negara kuat. Sebuah penjajahan dalam bentuk lain. (analisis detailnya lihat: Hasyim Wahid, *Telikungan Kapitalisme Global Dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 1999) hlm 9 - 19.

Senada dengan mantan Kanselir Jerman tersebut, -namun bertutur ke ranah yang lebih faktual-, Henry Kissinger mencatat, kondisi ekonomi dunia dihantui oleh tingginya tingkat inflasi per tahun, tingginya tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar yang tidak sehat, semakin bertambahnya tingkat pengangguran, dan lain-lain. Kondisi ini akan diperparah oleh ancaman kemiskinan ekstrim di banyak negara, berbagai bentuk ketidakadilan sosio-ekonomi, ketidakmampuan kembali negara-negara ketiga untuk membayar hutang mereka dan resesi ekonomi akan menjadi kenyataan pahit yang harus diterima masyarakat dunia.¹³ Kissinger seolah-olah ingin mengatakan bahwa, ada ketidakberesan terhadap aktifitas para pelaku ekonomi dunia, hingga melahirkan berbagai macam kondisi faktual yang cenderung menyengsarakan.

Pandangan tersebut menggambarkan sebuah kekhawatiran yang cukup mengejutkan dari salah seorang pemimpin dunia yang tentunya sangat paham dengan arah dan perkembangan ekonomi dunia modern. Dengan sikap dan pernyataan yang ditunjukkan oleh Mantan Kanselir Jerman, dan juga pemikir ekonomi Henry Kissinger tersebut, sangat wajar jika kemudian muncul sebuah pertanyaan terhadap konsep ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat dunia saat ini yang memunculkan sikap pesimisme itu. Hal ini penting untuk diungkap sebagai

¹³ Henry Kissinger, "Saving The World Economy", *News Week*, 24 Januari, 1983, hlm 16

sebuah upaya untuk mencari jawaban dan alternatif lain, jika sistem ekonomi yang bergerak saat ini berada dalam kondisi yang tidak wajar, atau bahkan akan menjerumuskan umat manusia ke jurang penghancuran (bukan Kehancuran).

Melihat kenyataan di atas, para ahli ekonomi dunia bukan tidak melakukan langkah-langkah kreatif untuk mengantisipasi semakin memburuknya ekonomi dunia. Mereka mencoba untuk membongkar sesuatu yang mereka anggap “salah” dalam melakukan praktek-praktek ekonomi.¹⁴ Mereka memunculkan simptom-simptom, misalnya; menguji ketidak seimbangan anggaran belanja dan pengeluaran, timbulnya kecenderungan proteksi, menguji efektifitas bantuan asing, kerjasama internasional yang tidak memadai dan lain-lain.¹⁵ Semua upaya tersebut dilakukan atas kesadaran bahwa ada “sesuatu” yang salah dalam praktek ekonomi dunia dan perlu dibenahi untuk mewujudkan tertata rapinya ekonomi ke depan. Kenyataan

¹⁴ Misalnya krisis 2001 dengan munculnya kasus Enron dan lain-lain; yang terjadi adalah krisis kepercayaan disebabkan oleh karena skandal akuntansi dan etika di kalangan manajemen dan profesional (akuntan dan analis) yang mengelola perusahaan Amerika. Mereka ini melakukan kerja sama strategis untuk meraup keuntungan dari sistem yang ada. Respons Amerika, misalnya, adalah dengan menambah peraturan-peraturan yang sudah banyak. Berdasarkan Sarbanes Oxley Corporate Act 2002 misalnya, maka akan dibentuk Public Corporation Oversight Board. Namun sayangnya dalam mengisi pos-pos itu sudah menimbulkan kontroversi karena adanya tarik menarik antara elit politik dan pihak-pihak yang berkepentingan. (Laporan Republika 12 Desember 2002)

¹⁵ Umar Chapra, *Al'Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, Terj. Lukman Hakim, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997) hlm. xxiv

ini sekaligus menegaskan bahwa dunia telah terancam “krisis” karena ada sesuatu yang salah dalam praktek ekonominya.

Daniel Bell mencatat, bahwa kondisi perekonomian modern di hadapkan pada berbagai dilema perekonomian yang menyebabkan munculnya kondisi perekonomian yang tidak wajar dan berujung pada resesi. Berbagai dilema tersebut berporos pada tiga hal yaitu; kerakusan borjuis, masyarakat demokratis yang tak terkendali dan etos individualistis.¹⁶ Kerakusan borjuis meniscayakan munculnya para pelaku ekonomi yang hanya mementingkan aspek pendapatan kepuasan material yang tiada batas. Agenda “puas dan tidak puas” diukur dari seberapa besar mereka mendapat keuntungan material, dengan menafikan hal-hal mendasar yang dibutuhkan manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain. Akhir dari pencarian kepuasan seperti inilah yang dapat menimbulkan berbagai macam eksploitasi dan penindasan oleh si kuat kepada si lemah.

Demokrasi adalah jalan terbaik diantara pilihan yang buruk. Meskipun dalam wacana politik kehadirannya dibutuhkan, namun ia bukan tanpa cacat. Kelemahan demokrasi yang paling mendasar adalah tiadanya jaminan moral terhadap pelakunya. Demokrasi membenarkan kemenangan bagi yang mendapat dukungan *kuantitatif* terbesar

¹⁶ Daniel Bell, *The Cultural Contradiction of Capitalism* (London: Heinemann, 1976) hlm 80

tanpa dibarengi dengan penyaringan kualitas bagi para kompetitornya. Akibat yang ditimbulkan, kemungkinan munculnya seorang pemenang yang kualitas moralnya di bawah standar. Demokrasi yang tak terkendali akan memproduksi para pelakunya menjalankan kebijakan tanpa dibarengi dengan landasan moralitas.

Dalam ekonomi modern, *-core* dalam wacana kapitalisme-, borok yang paling mengkhawatirkan adalah sangat dominannya etos individualistis (dalam terminologi Smith *perfect individual liberty*). Etos individualistis mempertahankan paham kebebasan individu dalam mengejar kepentingan dan keuntungan. Kepentingan individu bersifat absolut dan tidak boleh ada intervensi oleh siapapun. Ranah sosial bukan merupakan agenda utama, meskipun sedikit mendapat perhatian. Jika ranah sosial tidak lagi menjadi pertimbangan yang serius, maka akibat yang muncul adalah berkurangnya sensitifitas terhadap persoalan-persoalan sosial.

D. Tawaran Ekonomi Islam

Gambaran singkat dari pangkal boroknya perekonomian modern di atas, menunjukkan sangat perlunya melakukan kajian ulang terhadap landasan praktek ekonomi modern. Di samping itu, berbagai persoalan yang muncul yang menjadi kecemasan para pemerhati ekonomi – sebagaimana yang ditunjukkan oleh Henry Kissinger di atas-, lebih dari sekedar

kesalahan dalam pengambilan *policy*. Rekonstruksi ideologis adalah jalan yang paling tepat untuk mengawali tatanan sistem perekonomian menuju paraktek ekonomi yang berkeadilan.

Berangkat dari sini, langkah-langkah antisipatif yang dilakukan oleh para ahli untuk mengobati semakin buruknya kondisi ekonomi modern tersebut, terlihat sangat dangkal. Dengan langkah tersebut, memang untuk saat tertentu akan dapat mengobati luka yang menganga. Namun untuk jangka panjang masalah tersebut sangat mungkin akan muncul kembali, bahkan mungkin akan lebih besar. Hal ini akibat dari langkah pengobatannya bersifat “kosmetikal”, tidak menyentuh pada persoalan yang mendasar.

Kondisi faktual merosotnya kualitas ekonomi sebagaimana yang dikhawatirkan oleh dua tokoh dunia di atas tidak hanya memerlukan penanganan yang bersifat kosmetikal. Namun diperlukan upaya pembongkaran “ideologi” dari pelaku ekonomi yang mendasari praktek-praktek ekonomi. Diperlukan sebuah koreksi total dari para pelaku ekonomi, agar mereka dalam beraktifitas ekonomi selalu memperhatikan aspek kesehatan sosial yang terpancar dari karakter dan diri pribadi di atas kesadaran para individu. Praktek ekonomi bukan hanya disandarkan pada kepentingan pengumpulan profit semata, namun yang lebih penting dari itu, harus ada transformasi moral dari para pelaku ekonomi, hingga terwujud sebuah

interaksi positif yang tidak saling mencelakakan. Seharusnya ada jaminan bagi keberlangsungan kepentingan-kepentingan sosial bagi para pelaku ekonomi.

Di sinilah, Islam tampil menawarkan prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan landasan untuk berekonomi. Landasan moral-religius Islam yang menjadi *core* dalam segala aktifitas perekonomian, merupakan sumbangan emas bagi tertata rapinya perekonomian dunia menuju kondisi yang berkeadilan. Pengakuan hak individu, bagi Islam, tidak secara mutlak, namun pada waktu yang bersamaan, ada hak orang lain yang mesti menjadi perhatian. Atau dengan kata lain, ilmu ekonomi di samping berbicara pada ranah kepentingan individu, juga berbicara pada ranah tanggungjawab sosial (*social responsibility*). Keseimbangan antara hak-individu dan hak orang lain (tanggung jawab sosial) akan menjamin keselaran dan keadilan dalam praktek ekonomi.

Moral religius yang ditawarkan Islam, tidak berhenti pada ranah adanya *social responsibility* yang menjadi tanggungjawab individu. Akan tetapi ada prinsip yang lebih mendasar agar seorang individu dapat mempraktekkan tanggungjawab sosialnya lebih abadi dan bermakna, yaitu tauhid. Makna tauhid dalam ranah ekonomi adalah sebuah world view untuk “melibatkan Tuhan” dalam aktifitas ekonomi seseorang. “Pelibatan Tuhan” tersebut kemudian diobyektifikasi dengan keihlasan untuk berkorban dan

memperhatikan serta ikut menyelesaikan problem-problem sosial, -yang dalam terminologi di atas-, saya menyebutnya *social responsibility*.

Kehadiran Islam ke dunia ditujukan untuk memenuhi semua tuntutan kehidupan, memerangi kemiskinan dan merealisasikan kemakmuran dalam semua sisi kehidupan. Islam merupakan akidah, ibadah, moral syariat, hukum, keputusan dan perdagangan.¹⁷ Maka, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa, dalam Islam telah tergariskan sebuah jalan hidup yang sempurna untuk menuju keselamatan dunia dan akhirat, tidak saja menjaga keselamatan individu, namun juga keselamatan masyarakat umum.

Dalam persoalan Ekonomi, ada perbedaan prinsip yang cukup signifikan antara istilah Ekonomi Islam dengan Ekonomi yang lain. Dr. Muhammad bin Abdullah al-Araby mendefinisikan Ekonomi Islam; adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang diambil dari al-Qur'an, sunnah dan pondasi ekonomi yang dibangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.¹⁸

¹⁷ Abdullah Abdul Husain at-Thariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan tujuan*, Terj. M. Irfan Syofwani (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004) hlm.2

¹⁸ Ahmad Muhammad al-Ashl dan Fathi Ahmad karim, *Al-Nizham al-IqtishadiFi al-Islam wa mabadiuhu wa Ahdafuhu*, Cet. VII, (Makkah: maktabah Wahbah, 1405 H) hlm. 15

Sedangkan Dr Muhammad Syauki al-Fanjari mendefinisikannya; Ekonomi Islam adalah segala sesuatu yang mengendalikan dan mengatur praktek-praktek ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam (selanjutnya akan dijelaskan kemudian).¹⁹ Dua defenisi tersebut menegaskan bahwa, dalam Ekonomi Islam, ranah *religiousity Value* menjadi dasar setiap aktifitas dan semua transaksi yang dilakukan. Ia adalah sebuah prinsip umum yang sangat diperlukan bagi pembentukan watak pribadi yang bertanggungjawab dan mengedepankan kejujuran.²⁰

Nilai-nilai religiusitas yang menjadi prinsip dasar dalam ekonomi Islam – yang tidak ditemukan dalam sistem ekonomi lainnya-, antara lain; *pertama*, Ekonomi Islam diyakini sebagai sebuah sistem ekonomi yang digali dari nilai-nilai ketuhanan. Maka, ia mengenal batasan-batasan yang harus dipatuhi umat manusia, yang dikenal dengan istilah halal dan haram. Lebih jauh, batasan halal dan haram ini akan berakibat pada ancaman keselamatan tidak saja di dunia, namun juga di akhirat kelak. Kepatuhan manusia kepada halal dan haram ini juga diyakini sebagai sebuah wujud ketundukan

¹⁹ Konggres Internasional Ekonomi Islam, “*Al-Iqtisad al-Islami Buhus Mukhtarah*” (Jedah: Pusat kajian Ekonomi Islam Universitas King Abdul Aziz, 1400 H) hlm. 76

²⁰ Kejujuran pada dasarnya dapat dipunyai seseorang jika ia memiliki *self control* yang kuat. Sementara *self Control* ini hanya dapat tumbuh jika orang mampu menginternasiasikan nilai-nilai moral pada dirinya. Nilai moral keagamaan adalah yang paling efektif dalam membentuk kepribadian tersebut.

manusia pada Tuhannya. Kualitas ketundukan manusia kepada halal dan haram -yang terletak di semua bentuk aktifitas ekonomi- diyakini akan menjadi jaminan manusia untuk berperilaku jauh dari penyimpangan dan eksploitatif.²¹

Kedua, Islam memandang bahwa, pemilik dari semua sumber daya alam adalah SWT. Berbagai jenis sumber daya tersebut merupakan titipan Allah SWT kepada manusia untuk dikelola secara baik demi kesejahteraan alam dan manusia. Posisi manusia hanya sebatas “yang disertai/dititipi” bukan sebagai pemilik yang sesungguhnya. Posisi seperti ini dalam terminologi Islam disebut dengan *Khalifatullah fil ardl.*²² Maka dengan posisi seperti ini konsep kepemilikan individu dalam Islam tidak mutlak.

Ketiga, Dengan berdasarkan pada pandangan bahwa kepemilikan individu tidak bersifat mutlak, Ekonomi Islam selalu mempertimbangkan keseimbangan kepemilikan individu dan kepentingan sosial.²³ Pengakuan terhadap hak individu

²¹ Lihat: Abdullah Abdul Husain At-Thariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, hlm. 15-16, Bandingkan dengan Yusuf Hamid al-Alim, *Al-Nizam al-Siyasi wa al-Iqtisadi fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1975) hlm. 19

²² Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Cet. II, (Jakarta: Djembatan, 2003) hlm 13

²³ Perhatian terhadap kepentingan sosial dipandangannya sebagai salah satu perwujudan atas kepemilikan individu yang tidak mutlak tersebut. Ia harus dilakukan sebagai sebuah kewajiban yang sudah digariskan oleh Sang Pemilik Mutlak atas sebuah harta. Seorang individu, karena kesadarannya yang penuh terhadap nisbinya kepemilikan yang melekat pada dirinya akan menjadi jauh dari sifat-sifat rakus

dibarengi dengan penegasan adanya hak orang lain yang harus ditunaikan oleh setiap orang yang telah memenuhi kriteria tertentu. Di sana terbangun sebuah sikap yang memperkuat individu dan haknya dalam kepemilikan, dan pada waktu yang sama juga menumbuhkan perasaan tanggung jawab sosial. Ekonomi Islam meletakkan kepentingan individu sebanding dengan kepentingan masyarakat. Prinsip seperti ini, memberikan keleluasaan individu untuk berkompetisi memperoleh haknya, namun tetap dalam koridor kepentingan masyarakat dengan nilai-nilai universalitasnya.²⁴

Keempat, dalam Islam aktifitas ekonomi seseorang diarahkan untuk menjamin keselarasan dan kesejahteraan bersama, bukan untuk menumpuk kekayaan seseorang semata. Prinsip ini meniscayakan dapat tersebarnya harta secara adil dan merata ke segenap masyarakat. Islam mengecam keras terhadap praktek monopoli, penumpukan, dan tersentralnya harta pada seseorang tanpa mempertimbangkan pemerataan harta tersebut.²⁵

terhadap harta, sebuah sifat manusia yang menjadi modal untuk untuk menghindari eksploitasi terhadap orang lain.

²⁴ Lihat: Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, hlm 16-17

²⁵ Hal tersebut dapat dikonfirmasi kepada pandangan Islam terhadap harta; diantara: *pertama*, Islam memandang harta hanya sebagai titipan (QS 57:7, 24:33), *Kedua*, Islam memandang cinta berlebihan terhadap harta akan melahirkan kesombongan, keangkuhan dan berbangga diri (QS 3:14, 96:6-7), *ketiga*, Harta yang ada di tangan seorang manusia adalah sebagai ujian keimanan, terutama menyangkut bagaimana mendapatkan daan membelanjakannya (QS 8:28)

Kelima, Semua aktifitas manusia harus dibangun di atas orientasi *Ta'abud ila-Allah*. orientasi ini meniscayakan penafian semua orientasi hidup manusia, kecuali pada Yang Maha Pencipta. Manusia diajari untuk berperilaku bahwa semua yang kasat mata bersifat sementara dan fana'. Dalam kesementaraan inilah maka ia tidak patut untuk dianggap sebagai "yang satu-satunya" yang dapat menyebabkan manusia diperbudak olehnya. Inilah sebuah ajaran yang dahsyat untuk membentuk pribadi yang tangguh dan sekaligus memiliki sensitifitas tinggi terhadap alam sekitar. Demikian juga dalam persoalan ekonomi. Dengan berdasarkan pada prinsip di atas, aktifitas ekonomi manusia dalam Islam diarahkan untuk semata-mata pengabdian pada Allah. Sehingga tidak semestinya jika manusia harus menjadikan materi sebagai dasar dalam beraktifitas.

Di atas lima prinsip itulah Ekonomi Islam dibangun. Berbeda dengan praktek ekonomi lain, praktek ekonomi Islam dipraktekkan dan dikendalikan bukan oleh hasrat dan pengalaman seseorang semata, namun juga dipandu oleh pedoman-pedoman normatif yang diyakini dari Dzat Yang Maha Ghaib. Bahkan panduan normatif ini menjadi instrumen utama dalam menganalisa gejala-gejala perekonomian yang berlaku serta dipakai untuk menentukan arah perjalanan perekonomian ke depan. Dari sinilah ekonomi Islam meniscayakan munculnya sebuah interaksi bisnis yang mengedepankan kebersamaan dan kesejahteraan bersama,

hingga dapat mengantarkan masyarakat yang jauh dari eksploitasi dan saling mendzalimi.

E. Problem Kapitalisme dan Upaya Pembumih Ekonomi Islam

Sebagaimana disinggung dalam pendahuluan, cengkeraman kapitalisme menimbulkan banyak masalah sosial yang harus dibayar oleh sistem ini.²⁶ Persoalan negatif yang ditimbulkan tersebut khususnya berpengaruh pada para pelaku ekonomi. Ambillah misalnya krisis 2001 dengan munculnya kasus Enron di Amerika; yang terjadi adalah krisis kepercayaan disebabkan oleh karena skandal akuntansi dan etika di kalangan manajemen dan profesional (akuntan dan analis) yang mengelola perusahaan Amerika tersebut. Mereka ini melakukan kerja sama strategis untuk meraup keuntungan dari sistem yang ada.

William Webster yang telah ditunjuk untuk mengisi jabatan Accounting Oversight Board mengundurkan diri pada 11 November

²⁶ Sudah lama konsep dan sistem kapitalis ini menjadi sorotan, sejak Karl Marx dan para pengikutnya, pemikir sosialis lainnya seperti EF Schumacher, Soedjatmoko, D.R Scott, Pemikir ekonomi Islam seperti Umer Chapra, Prof M.A Manan, Masudul A Chouwdhury, Nejatullah Siddiqi, sampai pada aliran sempalan kapitalis seperti Joseph Stiglitz, Paul Ormerod, Lester Thurow, Kevin Phillip untuk menyebut beberapa nama. Sistem ini semakin menjadi bahan pemikiran ulang lagi setelah beberapa skandal perusahaan terjadi belakangan ini yang puncaknya menghasilkan Sarbanes Oxley Corporate Act 2002. Sejauh ini yang menjadi perhatian pemerintah Amerika adalah memperbaiki aspek teknis dari sistem kapitalis itu, bukan filosofinya sehingga tidak heran jika krisis demi krisis ekonomi akan terus berulang (Lihat: Sofyan S. Harahap, *Kapitalisme*, Republika Online, 12 Desember 2002)

2002, karena skandal keuangan. Bahkan integritas dan independensi Ketua SEC saat itu, Harvey L Pitt pun diragukan karena kedekatannya dengan industri akuntansi, yang seharusnya menjadi pengawasnya. Keadaan ini menggambarkan bagaimana sistem kapitalis itu sebenarnya sangat rentan dengan hal-hal yang bersifat manusiawi yang disebabkan oleh hawa nafsu serakah manusia yang sebenarnya dalam ekonomi Islam sudah diatur sedemikian rupa sehingga manusia dan segala keserakahan hawa nafsunya harus tunduk pada kepentingan yang lebih luhur dan lebih kekal bukan kepentingan sesaat atau sepihak.

Sistem kapitalis itu sendiri akan mengulangi kesalahan-kesalahan lama dan terus berulang jika sifat dasar, filosofinya tidak diperbaiki. Sifat dasar kapitalisme memang dari awalnya tidak adil, karena visi dan misinya hanya mengutamakan 'pemilik modal'. Pemilik modal sebagai motor penggerak, inisiator, leader dan otomotif juga sebagai penerima keuntungannya. Pihak lain seperti tenaga kerja, profesional adalah para pelayan yang harus mengikuti apa kata pemilik modal.

Kapitalisme juga mengabaikan aspek transenden, ketuhanan dan hal hal yang bersifat ghaib. Dasar filosofis rasionalisme sekular inilah yang menimbulkan ketidakseimbangan alam sehingga menimbulkan berbagai krisis yang berkelanjutan. Kapitalisme modern saat ini

dibangun dengan *monetary based economy* bukan *real based economy*. Ia didominasi oleh permainan-permainan ekonomi yang tidak riil. Permainan seperti ini hanya akan meniggikan rente.

Rente ekonomi diperoleh bukan dari melakukan kegiatan investasi produktif tetapi dari investasi spekulatif. Bahaya potensial berikutnya yang akan dihadapi seandainya masih terus mengamalkan sistem kapitalisme ini adalah runtuhnya sistem keuangan. Tanda tanda ini sudah ada sebagaimana angka-angka tentang efek negatif *monetary based economy* yang dijelaskan oleh keadaan negara-negara maju dan negara berkembang.

Di Negara seperti Jepang, China dan Jerman industri ini semakin mengkhawatirkan. Di Indonesia kita sudah rasakan krisis perbankan 1997 yang telah melahirkan krisis keuangan dan ekonomi yang berkepanjangan. Krisis perbankan ditutupi dengan pembentukan BPPN serta berbagai upaya merger, akuisisi dan lain sebagainya untuk menutupi kesalahan sektor ini. Paling tidak Rp 800 triliun uang rakyat terpaksa disumbangkan (disubsidi) untuk para konglomerat serta para pejabat (sebagai pengambil keputusan) untuk menutupi krisis perbankan ini.

Momentum krisis dengan 'dokter' IMF yang ternyata tidak memberi penyelesaian berarti, seharusnya menyadarkan para pelaku ekonomi untuk mengingat kembali beberapa konsep ekonomi Bung

Karno atau Bung Hatta, yang populer disebut Berdikari. Sebuah praktek ekonomi yang mendasarkan pada demokrasi ekonomi, ekonomi kerakyatan dan ekonomi yang bebas dari ketergantungan pada satu kekuatan. Gagasan Bung Karno yang mempopulerkan ekonomi berdikari, jika pada saat yang bersamaan mendasarkan diri pada nilai-nilai lima prinsip –sebagaimana disebut dalam sub bab sebelumnya-, maka sebenarnya itulah *core* dari Sistem Ekonomi Islam.

Sebenarnya sejak dekade 70-an telah mulai dipraktekkan Ekonomi Islam dan Lembaga Keuangan Islam dalam tatanan dunia Internasional. Kajian Ilmiah tentang Sistem Ekonomi Islam marak menjadi bahan diskusi di kalangan akademisi di berbagai Universitas Islam. Hasil kajian tersebut dalam tataran aplikatif mulai menuai hasilnya dengan didirikan Islamic Development Bank di Jeddah tahun 1975 yang diikuti dengan berdirinya bank-bank Islam di kawasan Timur Tengah. Hal ini bahkan banyak menggiring asumsi masyarakat bahwa Sistem Ekonomi Islam adalah Bank Islam, padahal Sistem Ekonomi Islam mencakup ekonomi makro, mikro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, *public finance*, model pembangunan ekonomi dan instrumen-instrumennya.

Meski diiringi oleh sikap skeptis dari beberapa kalangan, sistem ekonomi Islam telah menampilkan wujudnya yang “beda” dengan sistem ekonomi lainnya. perbedaan yang paling mendasar terletak pada sandaran

filosofisnya. Sistem Ekonomi Islam tidak terlepas dari seluruh sistem ajaran Islam secara integral dan komprehensif. Sehingga prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam mengacu pada *core* ajaran Islam. Kesesuaian Sistem tersebut dengan fitrah manusia tidak bisa terbantahkan. Dengan selalu menjaga keselarasan inilah yang tidak memunculkan benturan-benturan dalam Implementasinya. Kepentingan individu dibuka lebar, namun dalam waktu yang bersamaan individu memiliki kewajiban untuk menjaga kebebasan individu yang lain, dan menjaga kepentingan kolektif. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif menjadi pendorong bagi Bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak sistem sosial yang ada.

Inilah model atau sistem ekonomi Islam yang menunjang terbentuknya masyarakat Adil dan makmur. Pendekatan Islam terhadap sistem ekonomi merupakan sebuah pendekatan terhadap peradaban manusia sebagai satu kesatuan. Pendekatan ini sangat relevan dan amat mendesak untuk diimplementasikan sebagai ganti dari sistem ekonomi yang cenderung banyak menimbulkan konflik. Implementasi sistem ekonomi Islam tidak saja ditopang oleh argumen-argumen normatif, namun juga harus atas kesadaran tuntutan sejarah akan pentingnya menata kondisi dunia yang lebih beradab dengan beralih pada sistem yang memungkinkan untuk tujuan tersebut. Nampaknya upaya implemementasi yang mendasarkan pada tuntutan sejarah inilah

yang lebih mudah dikomunikasikan kepada masyarakat.

F. Kesimpulan

Tercerabutnya akar moralitas dari para pelaku ekonomi adalah akibat terparah dari sistem ekonomi kapitalis. Kondisi ini sekaligus menjadi momok yang paling menakutkan bagi perkembangan ekonomi. Para pakar telah mendiskusikan kondisi tersebut sejak awal, ketika mereka merasakan ada sesuatu yang salah dalam sistem ini. Namun yang paling disayangkan, diskusi yang diupayakan untuk memperbaikinya, sangat dangkal dan hanya menawarkan simptom-simptom belaka. Padahal yang diperlukan adalah membongkar landasan filosofis dari sistem tersebut.

Sejak dekade 70-an ekonomi Islam telah banyak diperbincangkan para ahli sebagai salah satu sistem ekonomi alternatif yang ditawarkan untuk mengganti sistem kapitalis. Secara *filosofis-ideologis* perbedaan yang sangat mendasar dari ekonomi Islam minimal terletak pada lima hal; *pertama*, Ekonomi Islam diyakini sebagai sebuah sistem ekonomi yang digali dari nilai-nilai ketuhanan yang akan membawa pelaku ekonominya memiliki *self control*. *Kedua*, konsep kepemilikan individu yang tidak mutlak. *Ketiga*, menekankan aspek keseimbangan kepentingan individu dan kolektif. *Keempat*, adanya kecaman terhadap monopoli dan sentralisasi harta oleh pemodal,

kelima, orientasi perilaku ekonomi diarahkan pada kepentingan suci pengabdian pada Allah SWT, yang akan membawa dampak pembentukan karakter kuat dan bermoral bagi para pelaku ekonomi.

Di atas -minimal- lima prinsip makro itulah sistem ekonomi Islam dibangun. Namun demikian, para pelaku ekonomi nampaknya belum begitu banyak *melirik* sistem ini, terbukti pada era 90-an, saat resesi dunia melanda belahan dunia ini, kapitalisme masih mencekeramnya. Logika-logika kapitalisme masih menjadi cara penyelesaian. Sehingga Ekonomi Islam belum banyak berperan.

Secara filosofis, sebenarnya sistem ini sangat sesuai dengan tuntutan fitrah manusia. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dalam beberapa hal; diantaranya pada penekanan ajaran moral oleh setiap pelaku ekonomi. Sikap yang dicontohkan oleh Yunus bin Obaid yang tidak mau menerima keuntungan berlipat, meski secara hukum sah, adalah menjadi bukti akan posisi moralitas dalam praktek ekonomi Islam. Keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan kolektif, juga menjadi perhatian yang serius dalam ekonomi Islam.

Implementasi sistem Ekonomi yang mempertimbangkan aspek moralitas, sebenarnya sebuah kebutuhan mendesak ditengah-tengah derasnya hantaman resesi dunia akibat kapitalisme. Upaya tersebut akan lebih efektif jika diwacanakan tidak di bawah

ranah normatif belaka. Yang lebih dibutuhkan adalah implementasi cerdas dari sistem ini sebagai sebuah jawaban *solutif* terhadap kepincangan sistem ekonomi yang telah dan sedang mencengkeram ini. Oleh karena itu, sangat urgen untuk mengimplementasikan sistem ekonomi Islam tidak saja atas nama *normatifitas*, tapi pembedaan *normatifitas* tersebut karena adanya tuntutan masyarakat dunia untuk membenahi kondisi ekonomi akibat cengkeraman kapitalisme.

Daftar Pustaka

- Al-'Alim, Yusuf Hamid, *Al-Nizam al-Siyasi wa al-Iqtisadi fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1975)
- Al-Ashl, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad karim, *Al-Nizham al-Iqtishad Fi al-Islam wa mabadiuhu wa Ahdafuhu*, Cet. VII, (Makkah: Maktabah Wahbah, 1405 H)
- Bell, Daniel, *The Cultural Contradiction of Capitalism* (London: Heinemann, 1976)
- Capra, M Umar *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, Lukman hakim (penerjemah), (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997)
- Harahap, Sofyan S., *Kapitalisme*, dalam *Republika*, 12 Desember 2002
- Al-Kaf, Abdullah Zaky, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002)
- Kissinger, Henry, "Saving The World Economy", dalam: *News Week*, 24 Januari, 1983.
- Kongres Internasional Ekonomi Islam, "*Al-Iqtisad al-Islami Buhus Mukhtarah*" (Jedah: Pusat kajian Ekonomi Islam Universitas King Abdul Aziz, 1400 H)
- Al-Nabhani, Taqiyudin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, M. Maghfur Wachid (penerjemah), Cet IV, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999).
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, Cet. III (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2004)
- Swasono, Sri-Edi, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial, Dari Klasikal dan Neo Klasikal Sampai ke The End Of Laissez-Faire*, (Jakarta: Perkumpulan Pra Karsa, 2010)
- , *Ekspose Ekonomika*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, 2010)
- Al-Thariqi, Abdul Husain, Abdullah, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan tujuan*, M. Irfan Syofwani (penerjemah) (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004)
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Cet. II, (Jakarta: Djambatan, 2003)
- Wahid, Hasyim, *Telikungan Kapitalisme Global Dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 1999).